

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 sudah mulai mengalami kondisi yang tidak begitu stabil dikarenakan perang dagang yang dilakukan oleh negara Tiongkok dan Amerika Serikat. Perang dagang tersebut menyebabkan pelemahan ekonomi negara AS dan Tiongkok. Adapula efek yang diberikan ke Indonesia dari perang dagang antar kedua negara tersebut.

Data dari berita Kompas (Miranti Karunia, 2019) mengatakan apabila perekonomian kedua negara tersebut melemah, maka akan berimbas ke seluruh negara termasuk Indonesia. Dikarenakan AS dan Tiongkok merupakan dua mitra dagang utama Indonesia, kalau perekonomian kedua negara melemah, maka bisa menyebabkan permintaan barang (ekspor) Indonesia mengalami penurunan. Dan apabila kegiatan ekspor mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terhambat.

Masalah perang dagang antara negara AS dan Tiongkok sudah mulai mereda, karena kedua negara membubuhkan sejumlah kesepakatan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Jepang dan juga Presiden AS Donald Trump yang sedang sibuk dengan politik dalam negeri. Presiden AS Donald Trump berjanji untuk sementara tidak akan menaikkan tarif produk impor dari Tiongkok dan AS juga mengizinkan perusahaan yang berada di AS untuk menjual produk Huawei (Miranti Karunia, 2019).

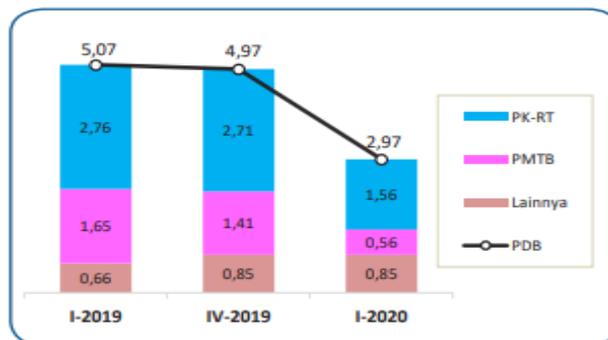
Ketika masalah perang dagang antar negara tersebut mulai mereda, tiba-tiba dunia dikejutkan dengan kabar dari virus yang menyerang Kota Wuhan (Tiongkok). Virus tersebut dinamai COVID-19, virus tersebut dengan cepat menyebar dan telah memakan banyak korban di Tiongkok. Tidak hanya di Tiongkok saja, ternyata virus tersebut sudah menyebar ke negara lain. Akhirnya beberapa negara menerapkan peringatan terhadap virus yang berbahaya ini dengan cara melarang perkumpulan masyarakat dikeramaian, dan menerapkan *lockdown*.

Lockdown adalah kondisi situasi dimana masyarakat dilarang untuk masuk ke suatu tempat atau meninggalkan area yang telah ditentukan. *Lockdown*

biasanya ditetapkan apabila ada kondisi darurat. Seperti pada saat pandemi COVID-19 ini ditetapkan *lockdown* oleh pemerintah supaya mencegah penyebaran virus tersebut. Namun, dampak dari *lockdown* ini akan mengganggu perekonomian negara, salah satu nya di negara Indonesia. Ekonomi di Indonesia mengalami penurunan atau pelemahan akibat dampak dari COVID-19. Beberapa sektor mendapatkan dampak akibat dari pandemi ini, salah satu nya sektor perekonomian.

Sektor perekonomian yang melemah, tidak hanya terjadi di Negara Indonesia saja melainkan di berbagai negara juga turut mendapatkan dampaknya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2020 kuartal I (year on year) ekonomi Negara Indonesia tumbuh 2,97%, tetapi pertumbuhan ini bisa dikatakan cukup rendah apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang bisa mencapai sekitar 5%. Sedangkan pada kuartal ke II (year on year) hasilnya adalah -5,32%.

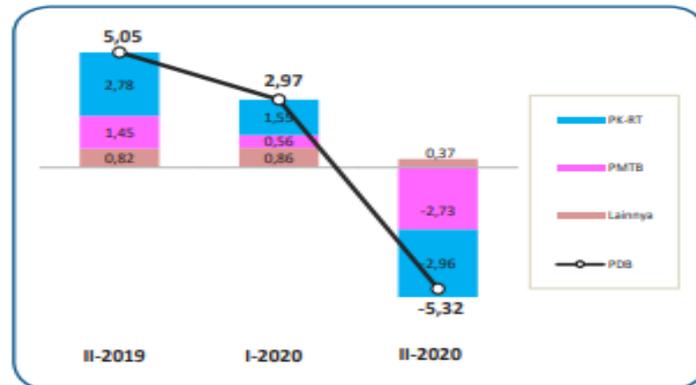
Hal ini terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2020 (y-on-y), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sumber utama terkontraksinya perekonomian Indonesia dengan berkontribusi negatif sebesar 2,96 persen dan 2,73 persen.



Sumber data : BPS (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I



Sumber data : BPS (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II

Dampak pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kinerja ekonomi, karena diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)/*lockdown*. PSBB adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Tujuan dari PSBB adalah supaya mencegah terjadinya penyebaran virus corona yang semakin meluas. Pembatasan tersebut meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan pada kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Salah satu sektor yang juga berdampak adalah sektor pariwisata. Sepi nya wisatawan pada sektor pariwisata membuat sektor-sektor lain mendapatkan dampaknya, seperti : sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan termasuk perdagangan. Menurunnya kinerja perekonomian ini dapat menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat.

Banyak masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19, ada yang di PHK, diberikan cuti tanpa bayar. PHK merupakan singkatan dari Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 BAB I Pasal 1 ayat (25), pengertian PHK yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Oleh karena itu masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan atau menjadi pengangguran sehingga mereka tidak mempunyai pendapatan. Tentunya karena tidak ada pendapatan, maka masyarakat cenderung lebih hemat dalam pengeluaran keuangan. Sehingga daya beli masyarakat pun menurun. Jika daya beli masyarakat menurun, ini merupakan masalah baru bagi negara. Seperti yang kita ketahui salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Apabila daya beli menurun, maka penerimaan pajak juga akan menurun, sehingga pendapatan negara juga menurun. Daya beli adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen dalam membeli kebutuhan barang atau jasa (Rosyadi, 2019).

Selain daya beli yang menurun, masyarakat yang di PHK akan menjadi pengangguran, dimana tingkat kemiskinan akan meningkat. Data terbaru dari BPS angka kemiskinan pada September 2019 adalah 9,22%, sedangkan pada Maret 2020 naik menjadi 9,78%. Menurut (Fajriwati, 2016) apabila angka kemiskinan terus meningkat akan mengakibatkan banyaknya pengangguran, karena berhubungan pendidikan yang membutuhkan biaya dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat. Dan juga dikarenakan kemiskinan menyebabkan banyak siswa/i yang putus sekolah. Maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan, dikarenakan sulit untuk bekerja. Kemudian tingkat kematian meningkat, masyarakat Indonesia banyak mengalami kematian karena kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang alami.

Untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi seperti ini, pemerintah pastinya memikirkan solusi baik dalam sektor perekonomian maupun kesehatan. Menurut berita Merdeka.com (Aditya Putra, 2020) dalam bidang kesehatan pemerintah telah membantu memberikan dukungan berupa menyiapkan peralatan medis yang dibutuhkan, membuat RS darurat untuk para pasien COVID-19.

Dari sisi perekonomian, pemerintah bersama lembaga keuangan dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga memikirkan solusi supaya perekonomian Indonesia bisa segera membaik dengan meningkatkan inklusi keuangan. Dalam meningkatkan inklusi keuangan perlu adanya lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang mendukung. Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari lembaga

keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, dimana letak perbedaan antara keduanya adalah di cara perhimpunan dana (Wiwoho, n.d.). Pembangunan sektor keuangan dalam hal sektor perbankan dapat meningkatkan akses dan penggunaan jasa keuangan perbankan oleh masyarakat, semakin terbuka masyarakat terhadap akses keuangan, semakin meningkatkan inklusi keuangan (Badriatul Ummah, dkk, 2014).

Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang menguasai industri keuangan Indonesia (Badriatul Ummah, dkk, 2014). Kondisi sektor perbankan yang diberitakan oleh kompas.com pada masa pandemi ini masih relatif baik, belum sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan (R. Ramli, 2020). Presiden Jokowi mendorong lembaga keuangan terutama perbankan untuk mengadakan sejumlah program untuk meningkatkan inklusi keuangan, serta harus memperhatikan layanan digital dari perkembangan teknologi di jaman digital ini (Khadafi, 2020). “Hal ini juga didukung oleh tingkat penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi yaitu 64,8 persen atau kurang lebih sekarang 170 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia,” kata Presiden Jokowi (29/01/2020) (Khadafi, 2020).

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan ketahanan sektor jasa keuangan saat ini dalam kondisi baik dan terkendali, dilihat dari sisi rasio permodalan dan likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga (Julita Sembiring, 2020). Presiden Jokowi juga melihat potensi pengembangan inklusi keuangan pada industri keuangan non-bank. Presiden menginstruksikan agar sektor-sektor seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dana pensiun, dan lain sebagainya melakukan pendalaman juga (Khadafi, 2020).

Seiring dengan berkembangnya sektor perbankan, distribusi layanan jasa perbankan dan non-perbankan juga harus merata. Meskipun jumlah kantor cabang bank, DPK yang terhimpun, serta kredit yang disalurkan semakin meningkat, namun masih terdapat masyarakat Indonesia yang belum dapat mengakses jasa perbankan (Badriatul Ummah, dkk, 2014). Umumnya pada masyarakat yang berada di pedesaan yang susah menjangkau layanan keuangan formal, sehingga mereka memilih untuk menyimpan/meminjam uang dengan lembaga informal.

OJK menilai bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu solusi pemulihan ekonomi nasional dan salah satu cara untuk mengetahui distribusi

layanan sektor perbankan. Inklusi keuangan menurut SNLKI 2017 adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Menurut berita liputan6.com (Yuniar, 2020) dari Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bernama Iskandar Simorangkir ketika diwawancarai mengatakan tujuan utama dari inklusi keuangan adalah mensejahterahkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk menabung, tetapi bisa juga menjadi akses pembiayaan.

Dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam beraktivitas ekonomi. Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta menjelaskan bahwa inklusi keuangan memiliki tiga hal penting bagi perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, dan untuk mendukung daya tahan ekonomi masyarakat dalam kondisi apapun.

Ditahun 2019 dilakukan survei inklusi keuangan masyarakat di Indonesia, hasil survei mencapai 76,19%. Terjadi peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39% dibanding tahun 2016 67,8%.



Sumber : OJK 2019

Gambar 1.3

Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Penyebab rendahnya inklusi keuangan di Indonesia, dikarenakan masih kurang infrastruktur yang di daerah, baik dari segi transportasi maupun internet, kurang pemahaman masyarakat akan pentingnya inklusi keuangan, demografis (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dll). Jadi, tujuan dari inklusi keuangan di masyarakat adalah meningkatkan akses, penggunaan, penyediaan serta kualitas produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Inklusi Keuangan, maka masyarakat harus mau bekerja sama dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan cara menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan. Produk atau layanan jasa keuangannya seperti, memiliki akun di bank, melakukan pinjam meminjam melalui teknologi, memiliki asuransi, dan lain sebagainya. Tetapi, pasti masih ada masyarakat yang tidak menggunakan produk/layanan jasa keuangan yang disediakan. Mungkin dengan menabung/menyimpan uang di bawah bantal, atau tidak mau *transfer* melalui *mobile-banking*, dan banyak yang tidak mau memiliki asuransi dengan berbagai alasan.

Salah satu provinsi yang tingkat inklusi keuangan masih dikatakan lumayan rendah, yaitu Provinsi Riau hanya sekitar 69% pada tahun 2019 dari hasil survei yang dilakukan oleh OJK. Menurut berita dari Antara Riau (Pradana Putra, 2019) "Hal ini dinilai masih jauh dari target pemerintah untuk tingkat literasi dan inklusi jasa keuangan pada tahun 2019 yaitu mencapai 75 persen," kata Deputy Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Riau Elvira Azwan di Pekanbaru, Jumat (1/11/19).

Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota, yaitu : Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Meranti.

Kota Dumai, salah satu kota yang ada di Provinsi Riau. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangkaraya dan Kota Tidore. Kota Dumai merupakan kawasan strategis dalam

pengembangan perdagangan Internasional, karena Kota Dumai berada di kawasan lintas perdagangan internasional dengan Selat Melaka. Kota Dumai juga dikenal sebagai kota minyak. Banyak industri-industri yang membantu memajukan Kota Dumai, seperti : Chevron, Pertamina, BKR, dll.

Kota Dumai memiliki 7 kecamatan yaitu : Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Dan memiliki 33 kelurahan yang ada di Kota Dumai.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Kota Dumai

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Bukit Kapur	47,6	2,41	15,40	238	107,9
Medang Kampai	12,4	2,10	4,00	33	110,8
Sungai Sembilan	33,9	2,29	10,98	35	108,4
Dumai Barat	44,1	2,28	14,29	981	103,3
Dumai Selatan	55,5	2,08	17,98	755	104,5
Dumai Timur	66,4	2,10	21,51	1 398	104,9
Dumai Kota	48,9	1,83	15,84	3 762	101,9
Dumai	308,8	2,15	100,00	179	105,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Jumlah penduduk Kota Dumai pada Tahun 2019 yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 308.812 jiwa. Dengan pembagian laki-laki 158.287 jiwa, perempuan 150.525 jiwa

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Dumai berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
0 s/d 4	17.326	17.328	17.285	16.759	16.735	16.711	34.085	34.063	33.996
5 s/d 9	15.830	15.628	15.395	15.207	14.924	14.643	31.037	30.552	30.038
10 s/d 14	14.121	14.031	13.908	13.373	13.295	13.229	27.494	27.326	27.137
15 s/d 19	13.673	13.496	13.320	12.558	12.379	12.222	26.231	25.875	25.542
20 s/d 24	12.516	12.525	12.562	12.038	12.091	12.188	24.554	24.616	24.750
25 s/d 29	14.044	13.996	13.840	13.570	13.441	13.263	27.614	27.437	27.103
30 s/d 34	13.182	12.954	12.740	12.975	12.811	12.691	26.157	25.765	25.431
35 s/d 39	12.130	12.008	11.914	11.887	11.729	11.574	24.017	23.737	23.488
40 s/d 44	11.327	11.161	10.892	10.856	10.540	10.195	22.183	21.701	21.087
45 s/d 49	10.176	9.825	9.446	9.610	9.222	8.841	19.786	19.047	18.287
50 s/d 54	8.086	7.725	7.361	7.693	7.331	6.985	15.779	15.056	14.346
55 s/d 59	6.273	5.969	5.668	5.835	5.526	5.228	12.108	11.495	10.896
60 s/d 64	4.634	4.351	4.061	3.681	3.416	3.157	8.315	7.767	7.218
65+	4.969	4.641	4.339	4.483	4.214	3.980	9.452	8.855	8.319
Jumlah	158.287	155.638	152.731	150.525	147.654	144.907	308.812	303.292	297.638

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Untuk laju pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto Kota Dumai berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.3

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Dumai

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas dasar Harga Koonstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen)		
	2019	2018	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,02	2,82	3,31
Pertambangan dan Pengalihan	2,29	-3,74	-4,95
Industri Pengolahan	7,17	7,51	5,17
Pengadaan Listrik dan Gas	7,29	3,21	1,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,24	1,13	4,6
Konstruksi	4,15	2,58	5,34
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor	2,92	1,94	2,84
Transportasi dan Pergudangan	5,36	3,84	4,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,85	6,5	6,3
Informasi dan Komunikasi	7,21	5,75	6,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	2,09	-0,74
Real Estat	5,34	3,89	3,43
Jasa Perusahaan	7,74	9,07	6,91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	0,28	0,11
Jasa Pendidikan	5,62	3,94	2,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,83	5,57	5,49
Jasa Lainnya	8,79	8,61	7,99
PDRB	5,61	5,35	4,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jasa keuangan dan asuransi di Kota Dumai hanya 0,12% pada tahun 2019. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat Kota Dumai yang tidak menggunakan Jasa Keuangan. Peningkatan inklusi keuangan di Kota Dumai perlu ditingkatkan supaya masyarakat bisa menggunakan produk/layanan jasa keuangan yang telah disediakan dengan begitu maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai, mendorong

proses pemulihan ekonomi nasional, dan juga untuk mendukung daya tahan ekonomi masyarakat Kota Dumai dalam kondisi apapun.

Dalam meningkatkan inklusi keuangan, ada beberapa indikator atau faktor yang digunakan. Beberapa penelitian terdahulu dalam meneliti peningkatan inklusi keuangan menggunakan pengaruh variabel literasi keuangan, dan beberapa variabel lainnya.

Seperti pada penelitian Diana Adriani dan I. Gst. Bgs. Wiksuana yang melakukan penelitian inklusi keuangan dalam hubungan kesejahteraan masyarakat di Bali dengan hasil bahwa secara keseluruhan tingkat inklusi keuangan di Bali masuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan sudah cukup banyak penduduk yang dapat mengakses perbankan. Tetapi, masih ada sebagian masyarakat yang kesulitan dalam mengakses perbankan karena letak geografis Bali yang masih ada di sekitar pedesaan yang jaraknya sangat jauh dari kantor perbankan. Hasil penelitian ini bahwa inklusi keuangan dalam jangka pendek belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan. (Adriani & Wiksuana, 2018).

Penelitian Delyana dan Ameliyani pengaruh variabel literasi keuangan dan modal sosial terhadap inklusi keuangan mahasiswa dengan hasil bahwa literasi keuangan dan modal sosial mempengaruhi inklusi keuangan mahasiswa (Pulungan & Ndururu, 2019). Penelitian pada masyarakat Kota Surabaya oleh Adinda Novita Sari dengan pengaruh dari variabel literasi keuangan, *FinTech*, dan Demografis terhadap inklusi keuangan masyarakat Kota Surabaya dengan hasil literasi keuangan, umur dan pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap inklusi keuangan, sedangkan *FinTech*, jenis kelamin dan pendapatan sama sekali tidak mempengaruhi inklusi keuangan (Kautsar, 2020).

Berdasarkan dari tujuan pentingnya inklusi keuangan bagi masyarakat dan negara serta dari literasi beberapa penelitian terdahulu, penulis ingin meneliti inklusi keuangan pada Kota Dumai dengan variabel x nya adalah literasi keuangan dan *financial technology*. Dari peneliti terdahulu mengatakan bahwa *financial technology* tidak mempengaruhi inklusi keuangan, tetapi menurut penulis di jaman era digital ini harusnya *financial technology* sangat mempengaruhi apalagi semua sudah memakai gadget. Oleh karena itu, penulis

mengambil judul “PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* TERHADAP INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT KOTA DUMAI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas adalah akibat dari pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil. Banyak masyarakat yang menjadi pengangguran karena di PHK dari tempat kerja hal ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat akan menyebabkan pendapatan negara juga menurun. Solusi yang diberikan antara pemerintah dan pihak OJK untuk meningkatkan perekonomian Indonesia adalah dengan cara meningkatkan inklusi keuangan, namun masih banyak masyarakat yang kurang paham dan tidak tahu dengan adanya ketersediaan akses produk/jasa layanan keuangan.

Berdasarkan masalah pokok tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan masyarakat Kota Dumai ?
2. Apakah *financial technology* berpengaruh terhadap inklusi keuangan masyarakat Kota Dumai ?
3. Apakah literasi keuangan dan *financial technology* secara bersamaan dapat berpengaruh terhadap inklusi keuangan masyarakat Kota Dumai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan masyarakat Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan masyarakat Kota Dumai.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan *financial technology* secara bersamaan terhadap inklusi keuangan masyarakat Kota Dumai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat yang berguna, seperti :

1.4.1 Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, menjadi sumber referensi dan dapat memperdalam pemahaman tentang literasi keuangan, FinTech, dan inklusi keuangan. Dari penelitian ini semoga para pembaca bisa menggunakan produk/layanan jasa keuangan yang telah disediakan, guna untuk meningkatkan inklusi keuangan negara. Semoga penelitian penulis dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk kebijakan dan merancang strategi dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi. Dan mengevaluasi apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan yang ingin dicapai atau masih perlu menambah langkah untuk meningkatkan inklusi keuangan.